

## **ABSTRAK**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi Badan Permasyarakatan Desa dalam Mengawasi Pelaksanaan Dana. Badan Permasyarakatan Desa berkedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra dari pemerintah desa dan merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang melekat didalamnya fungsi perwakilan dari segenap unsur masyarakat serta merupakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan roda Pemerintahan Desa. Idealnya, kehadiran Badan Permasyarakatan Desa akan membawa perubahan dalam dinamika sosial dan politik desa. Sebagai elemen penting yang dianggap bisa menjadi motor penggerak demokratisasi desa. Badan Permasyarakatan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai peran yang strategis di Desa diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran dan pengawasan terhadap kinerja Kades.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum Normatif, yaitu memahami azas-azas dalam peraturan Perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Eksistensi, Pengawasan, Badan Permasyarakatan Desa, Dana Desa.

## **ABSTRACT**

*This writing aims to find out the existence of the Village Consultative Board in overseeing the Implementation of Funds. The Village Consultative Body is located parallel to the Village Head and becomes a partner of the village government and is a representative institution of the community inherent in the function of representation of all elements of society as well as the control over the running of village governance. Ideally, the presence of the Village Deliberative Council will bring about changes in the social and political dynamics of the village. As an important element that is considered to be the motor driving the democratization of the village. Village Consultative Agency which is an institution that has a strategic role in the Village is expected to carry out its role in earnest, especially in terms of budget use and supervision on the performance of Kades.*

*The research method used in the writing of this thesis is Normative legal research method, namely to understand the principles in legislation. The approach used is the approach of legislation and conceptual approach.*

*Keywords: Existence, Supervision, Village Consultative Body, Village Fund.*

## DAFTAR ISI

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....      | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | iv  |
| MOTTO .....              | v   |
| HALAMAN PESEMBAHAN ..... | vi  |
| KATA PENGANTAR.....      | vii |
| ABSTRAK .....            | ix  |
| DAFTAR ISI.....          | xi  |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang.....                   | 1  |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                 | 11 |
| 1.3. Tujuan Penulisan .....                | 11 |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....               | 12 |
| 1.5. Keaslian Penelitian .....             | 12 |
| 1.6. Metode Penelitian.....                | 15 |
| 1.6.1. Jenis Penelitian .....              | 15 |
| 1.6.2. Pendekatan Penelitian.....          | 15 |
| 1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....            | 15 |
| 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 17 |
| 1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....           | 17 |

### BAB II BEBERAPA HAL MENGENAI DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGAWASAN DANA DESA

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 2.1. Pengertian Kewenangan.....       | 18 |
| 2.2. Pengertian Pengawasan.....       | 19 |
| 2.3. Pengertian Desa .....            | 20 |
| 2.3.1. Sejarah Pemerintahan Desa..... | 21 |

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.2. Kewenangan dan Prosedur Pemilihan Keanggotaan Pemerintah Desa ..... | 23 |
| A. Kewenangan Desa .....                                                   | 23 |
| B. Prosedur Pemilihan Keanggotaan Pemerintah Desa ..                       | 25 |
| 2.4. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa .....                           | 28 |
| 2.4.1. Tugan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa .....                   | 29 |
| 2.4.2. Prosedur Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.....                | 30 |
| 2.5. Pengertian Dana Desa .....                                            | 32 |

### **BAB III BEBERAPA HAL MENGENAI DANA DESA DAN DAMPAK KURANG PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa .....                                 | 34 |
| 3.1.1. A. Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Monitoring Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa .....               | 34 |
| B. Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Desa .....                                                             | 37 |
| 3.1.2 Strategi Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Realisasi APBDesa ..... | 38 |
| 3.1.3 Tehnik dan Proses Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa .....                          | 43 |
| 3.2. Dampak Kurang Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa ..                                            |    |
| 3.2.1. A. Transparansi Dana Desa Buruk.....                                                                 | 47 |
| B. Pengawasan Dana Desa.....                                                                                | 50 |
| 3.2.2. Faktor Penyebab Pasifnya Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan .....                           | 54 |
| A. Lemahnya Dukungan Masyarakat Terhadap Badan Permusyawaratan Desa.....                                    | 54 |
| B. Lemahnya Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa .....                                    | 55 |

#### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan..... 60

4.2. Saran..... 61

**DAFTAR PUSTAKA..... 63**

**BIODATA PENULIS..... 65**